KAFAAH JOURNAL, 7 (2), 2017, (147-158)
(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)
Available online at:
http://kafaah.org/index.php/kafaah/index

Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau pada Awal Abad XX

Risa Marta Yati
Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuklinggau
Email: risamarta.2@gmail.com

Abstract

This article aims to elaborate the influences of the modernization of education that occurred in Minangkabau since the middle of the 19th century to advance of Minangkabau women in the early 20th century. The progress of Minangkabau women is clear in the birth of educated female figures thatwill become to spearhead the emergence of the Minangkabau women's movement. The opening of women's schools, publication of women's newspapers, the establishment of women's organizations and associations and the active participation in the politics of the national movement are clear proofs of the size of the Minangkabau women's want to appear on the public spaces they never have before.

Keywords: *The movements of Minangkabau women, modernization, education.*

Abstrak

Politik Etis yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda terhadap masyarakat Sumatera Barat memberi peluang yang besar terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaruh modernisasi pendidikan yang terjadi di Minangkabau sejak pertengahan abad ke-19 untuk memajukan wanita Minangkabau di awal abad ke-20. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemajuan perempuan Minangkabau sangat jelas dalam kelahiran tokoh perempuan terdidik yang menjadi ujung tombak munculnya gerakan perempuan Minangkabau. Pembukaan sekolah perempuan, publikasi surat kabar wanita, pembentukan organisasi dan asosiasi perempuan dan partisipasi aktif dalam politik gerakan nasional adalah bukti nyata ukuran perempuan Minangkabau yang ingin tampil di ruang publik yang belum pernah mereka miliki sebelumnya.

Kata kunci: Pergerakan wanita Minang, modernisasi, dan pendidikan

PENDAHULUAN

Memasuki awal abad ke-20 kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Hindia-Belanda mengalami perubahan yang sangat substansial. Hal ini terlihat dalam bidang pendidikan yang menjadi salah satu pilar dari Politik Etis, sebagai wujud balas budi Pemerintah Kolonial Belanda atas penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat akibat Sistem Tanam Paksa. Di Minangkabau praktik Sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial difokuskan pada penanaman paksa kopi dan penyerahan paksa kopi yang dimulai setelah ditumpasnya Gerakan Paderi pada 1837.

Terlepas dari kejamnya praktik tanam paksa, kebijakan Politik Etis membawa kemajuan yang luar biasa bagi

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

dunia pendidikan di *Sumatra's Westkust* (Nama administratif yang diberikan oleh pemerintah Kolonial Belanda) di awal abad XX, yang ditandai dengan jangkauan akses pendidikan formal Belanda di semua lapisan masyarakat Minangkabau. Kemajuan pendidikan ini juga terbukti dengan semakin beraneka-ragamnya jenis-jenis lembaga pendidikan yang dibuka di *Sumatra's Westkust*. Sekolah-sekolah ini di antaranya adalah HIS (*Hollandsch Inlansche School*) yang dibuka setelah reorganisasi pendidikan tahun 1914; *Vervolg School* (Sekolah Sambungan) yang ditransformasikan dari Sekolah Kelas II; *Kweekschool* (Sekolah Keguruan), *Volkschool* (Sekolah Desa); *Normal School* (Sekolah Keguruan); *Schakelschool* (Sekolah Peralihan); *Opleiding School voor Inlandsche Amtenaaren* (OSVIA); *Meer Uitgebreid Laager Onderwijs* (MULO); *Algemene Middelbare School* (AMS); Sekolah Kejuruan (Sekolah Pertukangan, Sekolah Pertanian atau *Landbouw School*), dan *Vrouwen Normal School* (Sekolah Keguruan khusus perempuan) [Abdullah & Budhisantoso (ed.), 1984: 84-85; Martamin, dkk., 1997: 75-82].

Modenisasi pendidikan di *Sumatra's Westkust* pada awal abad ke-20 semakin meluas dengan kehadiran lembaga pendidikan Islam modern yang mengadopsi sistem pembelajaran dari Eropa dan Mesir. Sekolah Islam modern yang diprakarsai oleh Kaum Muda Minangkabau ini antara lain: *Dinijah School*, *Adabijah School*, *Sumatra Thawalib*, *Madras School*, *Dinijah School Putri*, dan *Normal Islam School* (Noer, 1991); Junus, 1960: 54-61). Sekolah-sekolah Islam modernis tersebut tumbuh subur di berbagai daerah dan sangat diminati oleh masyarakat Minangkabau sebagai tempat menuntut ilmu bagi anak-anak mereka, di samping kehadiran sekolah modern Belanda yang memiliki kurikulum dan sistem pengajaran yang lebih teratur.

Pada akhirnya modenisasi pendidikan di atas tidak hanya sukses melahirkan golongan intelektual pribumi di Hindia-Belanda, tetapi juga mendorong munculnya kaum terpelajar yang gigih memperjuangkan bangsanya yang tertindas oleh penjajahan kolonial. Pembentukan organisasi Boedi Oetomo pada 1908 yang diikuti oleh pendirian *Jong Java*, *Jong Sumateranenbond*, *Jong Ambon*, *Jong Batak*, *Jong Islametenbond*, dan berbagai perkumpulan pemuda serta pelajar lainnya adalah bukti nyata dari berkobarnya semangat pergerakan saat itu (Leirissa, 1985).

Modernisasi pendidikan juga berhasil melahirkan perempuan-perempuan terpelajar Minangkabau yang nantinya menjadi ujung tombak dari lahirnya pergerakan perempuan Minangkabau di awal abad ke-20. Diawali dengan pembukaan sekolah-sekolah khusus perempuan oleh golongan perempuan terpelajar untuk memberantas buta huruf khususnya di kalangan menengah ke bawah yang tidak tersentuh oleh sekolah formal Belanda, gerakan literasi perempuan Minangkabau pada tahap selanjutnya membawa pada pintu kemajuan bagi perempuan Minangkabau dalam skala yang lebih luas.

Diterbitkannya surat kabar khusus perempuan dan keterlibatan perempuan Minangkabau dalam politik pergerakan kemerdekaan, semakin menancapkan eksistensi perempuan Minangkabau sebagai aktor sejarah pergerakan Indonesia yang selama ini sama sekali tidak pernah diungkap. Wujud dari berbagai capaian pergerakan perempuan Minangkabau di berbagai lini kehidupan masyarakat di *Sumatra's Westkust* di awal abad XX inilah yang akan dielaborasi dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber, informasi dan jejak-jejak masa lampau. Sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini antara lain buku, artikel

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

dan surat kabar yang terbit antara abad ke-19 hingga abad ke-20. Fakta-fakta yang telah terkumpul dari berbagai sumber tersebut kemudian diuji otentisitas atau keakuratannya pada tahap kritik (kritik eksternal dan internal).Tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan faktar-fakta yang telah diperoleh dan mencari hubungan dari setiap fakta tersebut melalui analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan), sehingga keseluruhan fakta menjadi harmonis, masuk akal dan kredibel.Tahapan yang terakhir dari penulisan ini adalah tahap penulisan atau disebut dengan historiografi. Di tahap penulisan ini, *art of writing* dari penulis sangat menentukan hasil dari tulisan yang dihasilkan (Herlina, 2011: 15-16)

KEHIDUPAN PEREMPUAN MINANGKABAU SEBELUM ABAD KE-20

Gambaran perempuan Minangkabau sebelum abad ke-20 tidak jauh berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya yang ada di Hindia-Belanda masa itu. Siklus hidup mereka sepenuhnya terpaku pada aktivitas internal di dalam rumah sebagai anak perempuan, isteri, ibu dan nenek. Pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas pendidikan agama dan pendidikan kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Pola kehidupan dan tingkah laku perempuan sangat dikendalikan dan dibatasi oleh adat istiadat yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam hal ini perempuan sama sekali tidak diberi kebebasan dan kemandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan kepada "apa yang boleh" dan "tidak dibolehkan" mereka lakukan dalam pandangan adat dan kebiasaan.

Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau membawa peran ganda yang harus dipukul oleh kaum perempuannya. Mereka tidak hanya menjadi ibu yang wajib merawat anak-anak, suami dan mengatur kehidupan di dalam rumah tangga, namun juga bertugas sebagai pemegang kelangsungan garis keturunan. Tugas sebagai pewaris garis keturunan yang dibebankan kepada perempuan Minangkabau, berimplikasi pada kewajiban mereka untuk menjaga harta pusaka kaum yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut dengan harta perempuan atau *harato padusi* (Korn, 1941: 18). Dalam hal ini, perempuan yang paling dituakan diberi gelar kehormatan sebagai *amban puruekun citagueh* (peti simpanan pusaka berkunci kukuh). *Amban purue* ini diberikan tanggung jawab untuk menjaga harta pusaka kaum persukuan berupa areal persawahan lahan basah dan kering, tanah, *rumah gadang*, hewan ternak, termasuk tenaga kerja yang menjadi bagian dari harta pusaka kaum persukuan (Blackwood, 2001).

Kendali yang dimiliki oleh perempuan Minangkabau dalam pengelolaan harta pusaka kaum membawa mereka ikut terlibat aktif di sektor ekonomi. Karakteristik ekonomi pedesaan yang didominasi oleh pertanian yang berlaku umum di Minangkabau dan juga di Asia Tenggara, yang telah ada sebelum abad ke-20 memberi andil kepada perempuan untuk ikut bekerja di sawah dan ladang bersama dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu perempuan Minangkabau terlibat dalam pengolahan tanah, menyemai benih, menanam padi, memanen, bahkan mereka juga ikut membawa dan memasarkan hasil pertanian di pasar-pasar yang disebut dengan *pecan* atau *pakan*. Di samping itu, perempuan Minangkabau sebelum abad ke-20 juga telah bergiat dalam industri kerajinan seperti menenun kain dan tikar, menganyam, pemintalan, pembuatan renda, penyaringan emas, pewarnaan kain, pembuatan tembikar, dan industri rumah tangga lainnya (Loeb, 2013). Hal ini tidak hanya terjadi di Minangkabau saja, namun berlaku umum di kawasan Asia Tenggara. (Dobbin, 2008; Reid, 1992) menegaskan

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

bahwa memintal benang, mewarnai kapas, mencelup kain, dan menenun adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh kaum perempuan.

Tingginya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau tersebut membawa keterlibatan mereka secara langsung untuk ikut berdagang di pasar-pasar *nagari* yang ada di Minangkabau. Mereka umumnya adalah perempuan-perempuan yang telah menikah dan memiliki anak. Pedagang perempuan Minangkabau ini biasanya memperjual-belikan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian dan perkebunan serta berbagai barang kerajinan tangan yang dibawa dari rumah.

Kemunculan perempuan Minangkabau di berbagai pasar-pasar *nagari* di Minangkabau sebelum abad ke-20 tertulis dalam berbagai literatur kolonial. Pistorius dalam (Dobbin, 2008) menyebutkan bahwa pada 1838, pedagang perempuan Minangkabau banyak yang menjual hasil kerajinan tangan berupa kain katun lokal, sarung biru dan merah dengan kotak-kotak seperti kain Bugis di pasar Lima Kaum yang terletak di Payakumbuh. Pedagang perempuan Minangkabau ini ada juga yang menjual beras dalam kantung-kantung kecil, buah-buahan, dahan pohon kopi, hewan ternak (ayam dan itik) serta berbagai penganan yang mereka buat sendiri.

Partisipasi perempuan Minangkabau dalam hiruk pikuk aktifitas perdagangan di pasar-pasar *nagari* di *Sumatra's Westkust* juga disinggung oleh (Asnan, 2007) yang mengklasifikasikan pedagang perempuan Minangkabau sebagai pedagang kelas dua yang tinggal di daerah sekitar lokasi pasar. Para pedagang perempuan ini umumnya adalah pedagang-pedagang kecil dengan modal sendiri dan juga keuntungan yang sangat kecil (Dobbin, 2008).

Hingga dekade ke tiga dan keempat abad ke-20 eksistensi dari para pedagang perempuan ini masih terjadi dalam jumlah yang besar. Salah satunya tampak di pasar *FortdeKock* (Bukittinggi) yang disetiap sudut pasarnya ada pedagang perempuan Minangkabau. Banyaknya jumlah pedagang perempuan tersebut tidak terlepas dari sistem matrilineal yang memberikan peluang kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi di pasar-pasar *nagari* (Yati, 2014: 111).

Aktivitas perempuan Minangkabau di Pasar



Fort de Kock(1939)
Sumber: www.kitlv.nl, diakses,
Senin, 9 Juni 2014.

Di saat perempuan yang telah menikah dan mencapai usia paruh baya terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi di luar *Rumah Gadang*, kondisi yang berbeda terjadi pada anak perempuan yang dianggap telah memasuki masa pubertas (di usia dua belas atau tiga belas tahun), dimana mereka tidak lagi diperbolehkan untuk beraktivitas dengan bebas di luar rumah pada usia tersebut. Seperti yang tertulis dalam *schoolscriften* (Hadler, Berlian, & Abdullah, 2010) bahwa "*Djekalau anak perempoean itoe soedah naek ramboet [gadis], maka ia tiada pergi ka soerau lagi, melainkan, doedoek berkoeroenglah ia; agak soekar melihatnja*". Dengan pertimbangan untuk melindungi dari hal-hal buruk yang ada di luar rumah, khususnya dari laki-laki. Gadis-gadis yang sudah memasuki masa pubertas ini akan dijaga dengan sangat ketat oleh pihak keluarga dan persukuannya (Loeb, 2013).

Akibat dari pembatasan aktivitas tersebut, pergerakan anak-anak perempuan Minangkabau tidak diberi akses untuk sekolah sehingga mereka sama sekali tidak memiliki keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Kehidupan mereka hanya

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

berputar di dalam *rumah gadang* tanpa bisa melepaskan diri dari peran sebagai anak perempuan, remaja perempuan, isteri, serta ibu bagi anak-anak mereka. Di penghujung abad ke-19, ketika daerah "Minangkabau" muncul sebagai pusat kelahiran kaum intelektual di luar Pulau Jawa yang paling maju, kaum perempuannya sama sekali tidak ada yang bersekolah. Sekolah adalah hal yang sangat tabu dan sangat dilarang bagi perempuan Minangkabau saat itu (Hadler et al., 2010). Realitas ini menegaskan bahwa pendidikan yang dijalani oleh anak perempuan di Minangkabau sebelum abad ke-20 hanya pendidkan agama dan pendidikan kerumahtanggaan seperti mengurus rumah, memasak, dan berbagai keterampilan seperti menjahit, menganyam menenun, dan menyulam oleh ibu, nenek, dan kerabat perempuan mereka.

PEREMPUAN MINANGKABAU MENAPAKI ERA KEMAJUAN DI *SUMATRA'SWESTKUST*

Awal abad XX adalah dimulainya era kemajuan bagi masyarakat Minangkabau di *Sumatra's Westkust*. Kemajuan ini ditandai dengan kemunculan elite baru dan berkembangnya gaya hidup modern. Elit baru ini adalah lulusan sekolah formal kolonial yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Anak-Anak petani dan pedagang adalah golongan yang paling bergairah untuk masuk ke sekolah-sekolah ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Graves, (2007) bahwa murid-murid di sekolah-sekolah formal Belanda di *nagari* dataran tinggi *Sumatra's Westkust* didominasi oleh anak-anak petani dan pedagang.

Tidak ajeknya stratifikasi sosial di Minangkabau membuat masyarakat golongan menengah ke bawah menjadikan pendidikan sebagai kendaraan untuk menaikkan status sosial-ekonomi kepada tingkat yang lebih tinggi. Realitas ini berbeda dengan anak-anak *pangulu* dan *tuan kulareh* (golongan bangsawan) yang sama sekali tidak berkeinginan untuk sekolah. Prestise dan kekayaan milik orang tua yang nantinya akan mereka warisi, membuat anak-anak golongan bangsawan ini menganggap sekolah tidak penting. Tanpa sekolah pun mereka tetap menduduki status sosial yang dihormati dan mewarisi harta kekayaan yang berlimpah dari orang tuanya. Karena itulah tidak heran jika anak-anak bangsawan Minangkabau ini masuk ke Sekolah Kelas II berbahasa Melayu, bukan Sekolah Kelas I (bahasa pengantar bahasa Belanda) yang diperuntukan bagi kelas bangsawan (Graves, 2007: 235). Politik Etis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dipermulaan abad XX telah merangsang modernisasi pendidikan yang lebih luas dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ledakan jumlah elite terpelajar Minangkabau di awal abad ke-20 secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kaum perempuannya. Perempuan Minangkabau yang berasal dari keluarga elite terpelajar dan pegawai pemerintah kolonial seperti guru, jaksa, dan pegawai gudang kopi adalah generasi pertama yang menikmati akses pendidikan modern. Iklim akademis yang terbentuk di dalam rumah para birokrat dan pegawai kolonial ini yang mulanya hanya memberi kesempatan kepada anak laki-laki untuk bersekolah, pada akhirnya ikut berdampak secara langsung bagi anak-anak perempuan. Hal ini terlihat dari kemampuan baca-tulis dan berhitung dengan huruf latin serta bahasa Belanda yang didapatkan di sekolah-sekolah modern kolonial yang mereka masuki, maupun yang belajar mandiri di rumah bersama ayah dan saudara laki-laki mereka.

Perempuan Minangkabau terpelajar generasi pertama di awal abad ke-20 di antaranya adalah Sjarifah Nawawi, Sitti Djanewar Bustami Aman, dan Ainsjah Jahya, puteri dari Demang Jahja Datoek Kajo dari Koto Gadang. Sjarifah Nawawi menempuh pendidikan di *Europeesche*

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

Langere School (ELS) *Fortde Kock* yang kemudian dilanjutkan ke sekolah pendidikan guru *Kweekschool Fortde Kock* pada 1907. Ia adalah murid perempuan pertama yang mampu bersekolah di *Kweekschool Fortde Kock* (Hadler et al., 2010). Selepas menyelesaikan pendidikannya di *Kweekschool* Sjarifah masuk ke *Salemba School* di Batavia (Suryadi dalam harian *Singgalang*, 27 Februari 2011).

Perempuan terpelajar Minangkabau selanjutnya adalah Sitti Djanewar yang merupakan puteri dari Chatib Maharadja Sutan Dilawit, *Larashoofd* Sumpur Kudus dan Buo Lintau. Saat berusia enam tahun Sitti Djanewar berhasil diterima sebagai murid *Hollandsch Inlansche School* (HIS) Solok dan kemudian melanjutkan ke *Meijes Kweek school Salatiga* (MKS) di Jawa Tengah (Aman, 2006: 5-7). Sementara itu, Ainsjah Jahja, puteri Demang Jahja Daetoek Kajo pada tahun 1918 tercatat sebagai salah satu murid di MULO Katolik Padang (Hatta, 2013: 61).

Sjarifah Nawawi, Sitti Djanewar dan Ainsjah Jahya merupakan segelintir dari perempuan-perempuan Minangkabau yang berhasil mengakses pendidikan formal Belanda di awal abad ke-20. Dalam laporannya (Lekkerkerker, C. 1914; Subadio & Ihromi, 1978) menyebutkan bahwa dari 8980 jumlah siswa yang terdaftar di semua sekolah kelas II yang ada di *Sumatra's Westkust* tahun 1913, terdapat 926 murid perempuan. Sementara itu di Sekolah Kelas I murid perempuannya ada sebanyak 98 orang dan murid laki-laki 657 orang. Meskipun perbedaan jumlah murid perempuan dan laki-laki sangat tinggi, jumlah ini menunjukkan peningkatan luar biasa jika diamati dari jangka waktunya yang sangat singkat sejak akses pendidikan diperbolehkan bagi perempuan Minangkabau.

Munculnya kaum muda yang berperan sebagai motor penggerak kebangkitan Islam modernis di Minangkabau juga berdampak langsung kepada kemajuan yang signifikan bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam di *Sumatra's Westkust* pada awal abad ke-20. Sekolah Adabijah (1909), *Dinnijah School* (1915), dan Sumatera Thawalib adalah lembaga pendidikan Islam modernis pertama yang berhasil mencetak lulusan dan menyebar luaskan pemikiran-pemikiran baru yang digagas oleh golongan Islam modernis Minangkabau. Haji Abdullah Ahmad (pendiri Sekolah Adabijah) dan Zainuddin Labai (penggagas *Dinnijah School*) adalah dua tokoh Islam pembaharu yang mempelopori akses pendidikan bagi kaum perempuan Minangkabau di sekolah-sekolah Islam modernis (Noer, 1991).

Kehadiran sekolah Islam modernis tersebut tidak hanya berhasil memperkenalkan proses pembelajaran dengan sistem kelas yang dilengkapi dengan meja, kursi dan papan tulis, namun juga menggabungkan murid laki-laki dan perempuan dalam satu kelas (sistem ko-edukasi). Sistem ko-edulasi yang meniru sekolah sekuler Belanda ini memberi peluang yang semakin besar kepada anak-anak perempuan untuk mengakses sekolah-sekolah kaum modernis. Rahmah el-Junussijah dan Rasoena Said yang merupakan tokoh pelopor pergerakan perempuan Minangkabau di awal abad XX adalah lulusan dari sekolah tersebut.

LAHIRNYA PERGERAKAN PEREMPUAN DI MINANGKABAU ABAD KE-20

Pergerakan perempuan pertama kali muncul pada abad ke-15 yang digagas oleh Christine de Pizan. Ia berpandangan bahwa "Apabila gadis-gadis kecil diajari dengan baik, mereka akan memahami seluk beluk semua seni dan ilmu pengetahuan sebaik yang dipahami oleh anak laki-laki" (Beauvoir, 2003). Kecaman akan ketidakadilan bagi perempuan dilanjutkan oleh Mary yang mengkritik tradisi dan kebiasaan masyarakat di Inggris saat itu yang menjadi alat pembodohan bagi perempuan. Wollstonecraft menuding masyarakat dan lingkungan sebagai

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

penyebab utama perempuan menjadi makhluk yang tersubordinasi dan diabaikan kepentingan haknya. Untuk mengatasi hal ini Wollstonecraft menuntut diberikannya hak atas akses pendidikan bagi perempuan (Arivia, 2003).

Semangat akan pentingnya keadilan kaum perempuan di Eropa ikut menyebar sampai ke Hindia-Belanda yang ditandai dengan tuntutan hak-hak perempuan untuk bersekolah dan dilanjutkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan politik serta organisasi sosial saat itu. Seperti yang ditegaskan oleh Wollstonecraft dalam (Tong, 1998) bahwa pendidikan yang setara bagi kaum perempuan akan mendorong mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sekolah memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan nalar, mendorong dan merancang tujuan hidupnya sendiri dan bebas menentukan nasibnya sendiri, sehingga eksistensi mereka tidak hanya sekadar alat bagi kebahagiaan dan kesempurnaan orang lain.

Pendidikan terbukti menjadi faktor yang paling fundamental dalam merangsang munculnya pergerakan perempuan. Karena itulah gerakan feminis pertama di Minangkabau abad ke-20 bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang sama dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan-perempuan terpelajar yang lahir dari sekolah modern menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan kemajuan bagi kaumnya. Mereka mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan dan sekolah keterampilan yang tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana mengatur rumah tangga yang baik, tetapi juga mengajarkan mereka untuk baca-tulis dan berhitung dalam huruf Latin. Roehana Koeddoes dan Rahmah el-Junusiyah adalah pelopor dari gerakan kemajuan perempuan Minangkabau melalui pendidikan.

Tanggal 11 Februari 1911, Roehana Koeddoes bersama-sama dengan 60 orang perempuan termasuk isteri para tokoh adat dan agama Koto Gadang menggagas pembentukan *Vereeniging "Karadjinan Amai Satia"* di *Kota Gedang*. Roehana Koeddoes terpilih sebagai *president*-nya. Perkumpulan Karadjinan Amai Satia (KAS) Koto Gadang ini bertujuan untuk "Memajukan perempuan di Koto Gadang dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mencapai kemuliaan seluruh bangsa". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, *Vereeniging Karadjinan Amai Satia* membuka sekolah yang diberi nama Sekolah Karadjinan Amai Satia (Fitriyanti, 2013: 85; 90).

Sekolah Karadjinan Amai Satia yang bertempat di Koto Gadang tercatat sebagai sekolah perempuan pertama yang dibuka di Minangkabau (Hadler et al., 2010). Mata pelajaran yang diberikan di sekolah ini berupa membaca, menulis huruf Arab, Arab Melayu dan huruf Latin tingkat dasar. Pelajaran lainnya yakni berhitung, pendidikan rohani dan akhlak menurut ajaran Islam, adat istiadat, kepandaian mengurus rumah tangga, memasak, tata cara mengasuh anak yang baik, menyulam, menganyam, menjahit, menenun dan keterampilan lainnya yang sangat dibutuhkan perempuan saat itu (Fitriyanti, 2013: 90).

Jika sekolah formal kolonial memberi batasan umur kepada murid-muridnya, Sekolah Karadjinan Amai Satia memberi kebebasan kepada perempuan mana saja yang ingin belajar di sekolah ini. Karena itulah tidak aneh jika murid-muridnya ada yang anak-anak dan remaja perempuan, serta ibu-ibu dan perempuan dewasa yang belajar bersama-sama. Setiap murid-murid akan dibebankan membayar iuran sebesar 0.5 gulden per bulan. Bagi yang tidak mampu membayar, boleh membayar dengan potongan dari hasil penjualan jahitan dan kerajinan yang dihasilkan (Fitriyanti, 2013: 91).

Roehana Koeddoes adalah pelopor pergerakan perempuan Minangkabau dengan cara memperluas akses pendidikan bagi kaum perempuan. Ia juga mendirikan sekolah keterampilan perempuan bernama *Roehana School* di Bukittinggi pada tahun

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

1917. Kecintaan Roehana akan pendidikan telah mendorongnya untuk mengajarkan baca-tulis kepada teman-temannya dan juga anak-anak dan remaja di Simpang Tonang, Talu Pasaman di saat ia masih berumur 8 tahun (tahun 1892). Adat istiadat yang berkembang saat itu di masyarakat menganggap perempuan bersekolah seperti laki-laki sebagai tindakan yang tidak lazim. Hal inilah yang menyebabkan meskipun Roehana adalah anak seorang *hoofdjaksa*, ia sama sekali tidak dapat masuk sekolah. Kepandaiannya dalam tulis baca ia dapatkan dari ayah dan saudara-saudaranya di rumah. Secara otodidak Roehana berhasil mengasah dirinya tidak hanya mampu baca-tulis huruf Latin, Arab, Arab-Melayu dan berhitung, namun juga mampu berbahasa Belanda (Fitriyanti, 2013: 11). Sebuah pencapaian luar biasa dari seseorang yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di sekolah formal.

Jika Roehana Koeddoes fokus pada pendidikan baca tulis dan keterampilan perempuan yang bersifat umum, Rahmah el-Junusiyah memfokuskan pengembangan pendidikan perempuan berlandaskan pada agama Islam. Pada tahun 1923 Rahmah el-Junusiyah mendirikan *Al Madrasatud Dinijjah Lil Banaat* di Padang Panjang yang merupakan cikal bakal dari *Dinnijah School Puteri*. *Dinnijah School Puteri* tercatat sebagai sekolah Islam modernis khusus perempuan pertama yang didirikan di Hindia-Belanda (Vreede-de, Rosa, Ayuningtyas, Istiani, & Fauzi, 2008) Sama seperti Roehana, Rahmah el-Junusiyah mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas perempuan Minangkabau melalui pendidikan. Untuk itu, Rahmah el-Junusiyah membuka Sekolah Menyesal yang tujuannya memberantas buta huruf di kalangan perempuan Minangkabau saat itu. Keberadaan sekolah ini disambut dengan sangat antusias oleh ibu-ibu dan remaja puteri. Jumlah perempuan yang belajar di Sekolah Menyesal mencapai 125 orang. Mereka dengan sangat bersemangat untuk mengikuti pelatihan baca-tulis dan berhitung di sekolah ini (Noer, 1991). Untuk anak-anak dan remaja putri waktu belajar dilakukan pada pagi hari, sementara untuk ibu-ibu rumah tangga kegiatan belajar dilaksanakan pada malam hari (Peringatan 55 tahun Diniyah Puteri, 1989: 44).

Semangat kemajuan dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan perempuan Minangkabau di awal abad XX semakin meluas dengan berdirinya sekolah-sekolah khusus perempuan seperti Sekolah Kautamaan Isteri Minangkabau, yang merupakan cabang dari Sakolah Kautamaan Isteri Dewi Sartika di Bandung, sekolah tenun dan *Vrouwen Normal School* yang dibuka oleh pemerintah kolonial di Padang Panjang tahun 1918 (Yati, 2014: 228; Martam(Naldi, 2009)in, dkk., 1997: 82).

Akses pendidikan modern membawa kemunculan sosok perempuan Minangkabau di ranah publik dengan diterbitkannya surat kabar khusus perempuan. *Soenting Melajoe* adalah surat kabar perempuan Minangkabau pertama yang diterbitkan oleh Roehana Koeddoes pada 1912. Surat kabar ini tercatat sebagai surat kabar perempuan pertama yang ada di Hindia-Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, suratkabar perempuan *Asjraq* diterbitkan oleh Organisasi Sarekat Kaoem Iboe Sumatera tahun 1925. Pada tahun yang sama Organisasi Soeara Kaoem Iboe Soematera (S.K.I.S) di Padang Panjang juga menerbitkan sebuah surat kabar bernama *Soeara Kaum Iboe Soematera* (Naldi, 2009).

Surat kabar membawa refleksi dan interpretasi berbeda bagi perempuan Minangkabau akan eksistensi dan peranan mereka di tengah-tengah masyarakat. Jika pada periode sebelumnya pola hidup mereka hanya terkungkung di dalam Rumah Gadang dan aktif secara ekonomi, surat kabar yang identik dengan modernitas mendorong perempuan Minangkabau untuk mengambil bagian dalam pergerakan nasional pada tataran nasional dan kosmopolitan. Mereka menyadari bahwa pengaruh mereka di zaman kemajuan jauh

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

melampaui satu generasi dari rumah tangga, kampung dan *nagari-nagari* yang dulunya sama sekali tidak bisa mereka gapai (Hadler et al., 2010). Di samping itu, surat kabar juga membawa keberanian bagi perempuan Minangkabau untuk vokal dalam menuntut hak-hak mereka yang selama ini dipasung oleh adat istiadat yang berlaku. Eksistensi *Soenting Melajoe* menurut (Samry & Omar, 2012) layaknya sinar dalam kegelapan, mikrofon yang menyuarakan suara-suara perempuan yang terkurung di bilik Rumah Gadang. Penerbitan surat kabar khusus perempuan adalah akar dari pergerakan yang kemudian mencuat dan semakin menggelora saat perempuan Minangkabau terjun dalam dunia politik.

Puncak dari lahirnya pergerakan perempuan Minangkabau ditandai dengan keterlibatan mereka secara aktif dalam bidang politik untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Aktivitas ini dimulai dengan keikutsertaan perempuan Minangkabau dalam organisasi kepemudaan dan pergerakan di *Sumatra's Westkust* seperti *Jong Sumatranen Bond* (JSB) Cabang Padang, Persatuan [Partai] Muslimin Indonesia (Permi), Perhimpunan Murid Dinijjah School (PMDS), dan PNI Baru. Dalam hal ini, (Hadler et al., 2010) menegaskan bahwa tuntutan akan ruang diskursif bagi perempuan Minangkabau dilingkup politik dan publik dimulai setelah peristiwa Pemberontakan Pajak 1908. Upaya memperluas hak politik bagi perempuan Minangkabau diteruskan dengan pembentukan perserikatan-perserikatan perempuan Minangkabau, yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian organisasi khusus perempuan. Organisasi perempuan Minangkabau ini memiliki hubungan dengan organisasi pergerakan perempuan di daerah lainnya di Hindia-Belanda.

Vereeniging Karadjinan Amai Satia adalah perkumpulan perempuan Minangkabau pertama yang dibentuk pada 11 Februari 1911 dengan Roehana Koeddoes sebagai pelopornya (Fitriyanti, 2013: 90). Pada periode selanjutnya dibentuk organisasi Sarekat Kaoem Iboe Sumatera dan Soeara Kaoem Iboe Soematera (S.K.I.S) pada 1920 (Blackburn, 2007). Sementara itu, di kalangan perempuan modernis Minangkabau, digagas pendirian Aisyiah cabang Minangkabau yang merupakan sayap dari Muhammadiyah Minangkabau.

Gairah akan peralihan kehidupan perempuan Minangkabau dari urusan-urusan domestik rumah tangga ke partisipasi aktif dalam ranah politik sangat didorong oleh semangat nasionalisme kala itu yang tersebar luas di seluruh Hindia-Belanda. Kebangkitan nasional yang ditandai dengan aktivitas politik yang lebih progresif dalam menghadapi kolonisasi pemerintah kolonial Belanda ikut membawa keberanian perempuan untuk tampil di depan publik guna menyampaikan gagasannya tentang perjuangan kemerdekaan bangsa. Abdullah (200(Anwar, 2004, 2011)9: 209-210) mencatat di tahun 1933 dari 11.000 orang anggota aktif Partai Permi (Persatuan Muslimin Indonesia), PSII atau PNI Baru, 30% nya adalah perempuan. Kedudukan anggota perempuan Minangkabau ini tidak hanya sebagai anggota biasa namun juga aktif menjabat sebagai pengurus cabang dan pengurus pusat Partai Permi.

Rasoena Said adalah salah satu kader perempuan Permi yang paling vokal dan paling berpengaruh. Ia dijuluki sebagai "Singa Minangkabau" atas keberaniannya dalam mengkritik kebijakan eksploitasi pemerintah colonial di berbagai forum akbar dan pertemuan Permi. Pidato-pidato yang disampaikan oleh Rasoena Said dalam berbagai forum publik sangat tajam dan bahkan lebih bersemangat dibandingkan dengan kaum laki-laki (Anwar, 2011). (Kahin, 2005) bahkan menyebut Rasoena Said sebagai orator yang berani dan terus terang menyerukan kemerdekaan Indonesia saat menentang Ordonansi Sekolah Liar di sebuah rapat umum Permi.

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

Dalam pidatonya, Rasoena Said dengan tegas menyatakan: Pintu kemerdekaan sudah terbuka, dan harap apabila anda kembali ke tempat masing-masing, saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu: membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing.

Akibat pidatonya ini, Pemerintah Kolonial Belanda menangkap dan memenjarakan Rasoena Said pada bulan Desember 1932 (*Sinar Sumatra*, 9 Desember 1932). Pemerintah kolonial kemudian menjatuhkan hukuman penjara kepada Rasoena Said selama lima belas bulan. Untuk memutuskan kontaknya dengan tokoh-tokoh pergerakan Minangkabau, Pemerintah Kolonial Belanda mengirim Rasoena Said ke penjara Bulu Semarang. Rasoena Said kala itu masih berusia 23 tahun, usia yang masih sangat muda. Saat penangkapan Rasoena Said tercatat sebagai pemimpin Permi pertama yang ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Kahin, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga ikut andil sebagai ujung tombak dalam pergerakan kemerdekaan di Minangkabau saat itu. Enam tahun kemudian, tepatnya di tahun 1939 Rasoena Said baru dibebaskan (Anwar, 2011).

Sikap militan yang ditampilkan oleh Rasoena Said yang membawanya harus mendekam di penjara mendorong kegairahan yang luar biasa bagi pergerakan kaum perempuan Minangkabau saat itu. Dalam surat kabar *Sinar Sumatra*, 11 Februari 1933 disebutkan bahwa penangkapan Rasoena Said "…*soedah membikin seomangatnja kaoem iboe semakin berkobar-kobar*" (*Sinar Sumatra*, 11 Februari 1933).

Tokoh pergerakan perempuan Permi lainnya yang juga sangat agresif terhadap Pemerintah Kolonial Belanda adalah Rangkayo Rasimah Ismail, Fatimah Hatta dan Ratna Sari (Noer, 1991). Karena dianggap terlalu radikal dan dituduh memprovokasi rakyat untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah kolonial, Rangkayo Rasimah Ismail ditangkap dan di penjara di tempat yang sama dengan Rasoena Said di Semarang (*Sinar Sumatra*, 11 Februari 1933).



Roehana Koeddoes, Rahmah el-Junusiyah, dan Rasoena Said

Sumber: Fitriyanti, 2013; Peringatan 55 tahun Diniyah Puteri, 1989; *Koetamaan*-Isteri, Januari 1938

Ainsjah Jahja tidak bisa dilupakan begitu saja eksistensinya dalam kemajuan perempuan Minangkabau di pentas politik *Sumatra's Westkust* di awal abad 20. Di saat masih menjadi siswa di MULO Katolik Padang, Ainsjah Jahja juga menjabat sebagai komisaris dalam kepengurusan *Jong Sumatranen Bond* (JSB) Cabang Padang pada tahun 1918 (Hatta, 2013: 61). Posisi komisaris tersebut tentu saja tidak dengan mudah diduduki oleh Ainsjah Jahja, apalagi dengan keanggotaan JBS yang didominasi oleh laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa dibukanya kesempatan oleh organisasi pergerakan masa itu agar perempuan dapat ikut sebagai anggota dan pengurus organisasi, menjadi faktor utama keikutsertaan perempuan dalam pergerakan kemerdekaan. Dalam hal ini kehadiran laki-

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

laki terpelajar (baik lulusan sekolah formal Belanda maupun sekolah Islam modernis) yang menyadari pentingnya emansipasi dikalangan perempuan turut serta menjadi motor penggerak kemajuan bagi kaum perempuan termasuk di Minangkabau. Mereka mendukung perempuan bersekolah, perempuan menulis dalam surat kabar, dan perempuan terjun dalam dunia politik perjuangan kemerdekaan.

KESIMPULAN

Lahirnya pergerakan perempuan Minangkabau dilator belakangi oleh modernisasi pendidikan di *Sumatra's Westkust* yang berdampak langsung pada akses pendidikan bagi kaum perempuan Minangkabau. Kesempatan untuk bersekolah ini yang nantinya melahirkan perempuan-perempuan terpelajar yang menjadi ujung tombak kelahiran pergerakan perempuan Minangkabau. Perempuan-perempuan terpelajar ini mendirikan berbagai sekolah khusus perempuan seperti Sekolah Karadjinan Amai Satia, *Roehana School*, Sakola Kautamaan Isteri Dewi Sartika di Bandung, Sekolah Tenun, *Vrouwen Normal School*, *Dinnijah School Puteri*, dan Sekolah Menyesal.

Bermula dari akses untuk bersekolah, perempuan-perempuan Minangkabau ternyata mampu melangkah lebih jauh dengan menerbitkan surat kabar khusus perempuan dan terlibat aktif di politik pergerakan. *SoentingMelajoe*, *Asjraq*, *Soeara Kaum Iboe Soematera* adalah corong yang menyuarakan suara-suara perempuan yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Segala harapan akan hak dan kesempatan yang setara dengan kaum laki-laki benar-benar dimanfaatkan oleh perempuan Minangkabau untuk menyuarakannya kepada masyarakat luas.

Aktivitas dalam politik pergerakan mengkristalisasi pergerakan perempuan Minangkabau menjadi sangat radikal dan responsif. Rasuda Said, Rasima Ismail dan Aisjah Jahja adalah segelintir dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau yang berhasil menancapkan kukunya di arena politik Minangkabau dan juga politik nasional. Mereka bergerak lebih jauh lagi, tidak hanya memperjuangkan kemajuan kaumnya namun ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

Referensi

Abdullah, Taufik & S. Budhisantoso. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Aman, Bustami.2006. *Perjalanan Hidup Seorang Guru*. Jakarta: tanpa penerbit.

Anwar, R. (2004). *Sejarah kecil" petite histoire" Indonesia* (Vol. 1). Penerbit Buku Kompas.

Anwar, R. (2011). *Sutan Sjahrir: negarawan humanis, demokrat sejati yang mendahului zamannya*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Arivia, G. (2003). *Filsafat berperspektif feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).

Asnan, G. (2007). *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Ombak.

Beauvoir, S. de. (2003). Second Sex: Fakta dan Mitos. *Terj. Toni B. Febriantono. Surabaya: Pustaka Promethea*.

Blackburn, S. (2007). *Kongres perempuan pertama*. Yayasan Obor Indonesia.

Blackwood, E. (2001). Representing women: the politics of Minangkabau Adat writings. *The Journal of Asian Studies*, *60*(1), 125–149.

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)

Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri; Minangkabau 1784-1847 (Economic fluctuation, the Rise of Islam and the Padri Movement: Minangkabau 1784-1847*. Komunitas Bambu.

Fitriyanti. 2013. *Roehana Koeddoes: Perempuan Menguak Dunia*. Jakarta: Yayasan d'Nanti.

Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hadler, J., Berlian, S., & Abdullah, T. (2010). *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Freedom Institute.

Hatta, Mohammad. 2013. *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Kahin, A. R. (2005). *Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia.

Korn, V. E. 1941. "Kedudukan Wanita di Rumahnya Sendiri dan sebagai Pasumandan" dalam Maria Ulfa Subadio & T.O Ihromi (ed.). 1978. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia: Bunga Rampai Tulisan-Tulisan*. Pilihan bacaan, hlm: 18-23. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Leirissa, R. Z. (1985). *Terwujudnya suatu gagasan sejarah masyarakat Indonesia 1900-1950*. Penerbit Akademika Pressindo.

Loeb, E. M. (2013). Sumatra, Sejarah dan Masyarakatnya. *Yogyakarta: Penerbit Ombak*.

Martamin, Mardjani, dkk. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Naldi, H. (2009). *" Booming" surat kabar di Sumatra's Westkust*.

Noer, D. (1991). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1985. *Eddi Rudiana Arief (Peny.), Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.

Reid, A. (1992). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin* (Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Samry, W., & Omar, R. (2012). Gagasan Dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy*, *39*(2).

Subadio, M. U., & Ihromi, T. (1978). *Peranan dan kedudukan wanita Indonesia: bunga rampai tulisantulisan*.

Tong, R. P. (1998). Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. *Yogyakarta: Jalasutra*.

Vreede-de, S. C. L.-P., Rosa, E., Ayuningtyas, P., Istiani, D., & Fauzi, M. (2008). *Sejarah perempuan Indonesia: gerakan & pencapaian*. Komunitas Bambu.

Yati, Risa Marta. 2014. "Modernisasi Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Perempuan Minangkabau di Sumatra's Westkust (1900-1942)". *Tesis*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

© 2017 by Kafa'ah All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA)